

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KECAMATAN TIGARAKSA (STUDI PADA DINAS
TATA RUANG KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI
BANTEN)**

***POLICY IMPLEMENTATION FOR THE UTILIZATION OF
TIGARAKSA DISTRICT REGION SPACES (STUDY IN TATA
SPACE DEPARTMENT OF TANGERANG DISTRICT, BANTEN
PROVINCE)***

Yulisa Ardiana¹, Arnia Fajarwati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa. Studi dilakukan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dihindari membutuhkan ruang sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan yang semakin terbatas untuk dimanfaatkan secara optimal. Letak Kecamatan Tigaraksa yang strategis sebagai pusat pemerintahan, peruntukan kawasan industri besar, dan peruntukan hunian dengan kepadatan sedang hingga tinggi membutuhkan pemanfaatan ruang secara optimal. Permasalahan yang ditemukan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang berupa aturan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa dapat optimal melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa, dan menganalisis faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal sehingga pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, pemanfaatan ruang

ABSTRACT

This study examines the implementation of the policy of the District of Tigaraksa space utilization. The study was conducted at the Department of Spatial Tangerang District,

Banten Province. Tangerang regency is one area in Indonesia which was established as part of the National Strategic Area. The dynamics of population growth is inevitable need space as a place to carry out the increasingly limited in order to be optimally utilized. District of Tigaraksa strategic layout as the central government, the allotment of large industrial area and residential allotment with moderate to high densities require optimal space utilization. Problems found irregularities utilization of space is not as intended.

Policies issued by the government in the form of rules Tangerang District Subdistrict Tigaraksa space utilization can be optimized through approach to theories of communication factors of policy implementation, resources, attitudes executor, and a bureaucratic structure. The method used in this research study is descriptive analysis with qualitative approach. Techniques of data collection is done through participant observation, in-depth interviews, and dokumentas. The purpose of the study is to examine the implementation of the policy implementation Tigaraksa District of spatial use, and analyze the factor –factor supporting and hindering the implementation of policy on the use of space subdistrict Tigaraksa conducted by district spatial Tangerang.

The results of the field study shows that policy implementation is not optimal space utilization of the District of Tigaraksa not as intended.

Keywords: *Implementing a policy, space utilization, District Tigaraksa*

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan nasional.

1. PENDAHULUAN

Suatu wilayah pada dasarnya adalah sebuah lingkungan dinamis yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari penduduk sebagai salah satu elemen utama dalam kehidupan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang makin meningkat disertai perkembangan kehidupan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing dari sumber daya dan ruang yang keberadaannya sangat terbatas memerlukan pemanfaatan ruang yang baik sesuai rencana peruntukan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang yang baik sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebenarnya berguna untuk masyarakat dan pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber daya daerah secara

Secara umum menurut Soerjani (1987:22) faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perpindahan (migrasi). Seiring dengan pertumbuhan penduduk, Kecamatan Tigaraksa juga mengalami perkembangan fungsi ruang wilayah. Perkembangan tersebut karena ditetapkannya wilayah Kecamatan Tigaraksa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2013 sebagai pusat pemerintahan peruntukan kawasan industri besar, pemukiman tinggi, pemukiman sedang. Kecamatan Tigaraksa merupakan wilayah yang strategis untuk perkembangan perumahan, industri, perdagangan dan jasa. Harus memiliki konsep pemanfaatan ruang yang baik karena merupakan bagian dari wilayah strategis nasional dan juga sebagai pusat pemerintahan. Apabila tidak dimanfaatkan

secara serius dampaknya adalah internal Kabupaten Tangerang hingga Provinsi Banten. Kondisi demikian, terjadi banyaknya penyalahgunaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut seperti dihilangkan kawasan hijau yang seharusnya menjadi daerah resapan air sehingga menyebabkan sering terjadi banjir saat musim hujan, terutama di wilayah Sodong dan Margasari. Padahal Wilayah Margasari sebagai lahan konservasi dan berfungsi untuk melindungi kawasan di sekitarnya (Wilayah Sodong), tetapi ternyata aturan – aturan tersebut tidak efektif sehingga hampir 60% kawasan tersebut dalam kondisi rusak. Pada kenyataannya, rencana wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah setempat untuk kawasan tersebut belum berfungsi secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi pemanfaatan ruang ditegaskan pasal dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007

Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penataan Ruang. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penataan Ruang Pasal 37 ayat 1. Kemudian yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Sebelum menjelaskan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang, terlebih dahulu akan dijelaskan teori mengenai kebijakan. Menurut James Anderson dalam Winarno (2007:16) secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Pemanfaatan ruang merupakan bagian dari sistem penataan ruang. Di dalam penataan ruang, letak pemanfaatan ruang berada di tengah-tengah pelaksanaan penataan ruang

yaitu pada perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang akan terjadi secara optimal apabila pada tahap proses implementasi kebijakan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan cara atau model – model implementasi kebijakan yang bisa diterapkan dalam pemanfaatan ruang sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dan optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu :Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis melalui panduan teori berdasarkan model Edward III yang merupakan model teori yang paling cocok dengan studi penelitian implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Tigaraksa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

George C Edward III model teori yang tepat pada awal untuk studi penelitian ruang wilayah di Kecamatan Tigarksa yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Pemberian informasi kebijakan mengenai pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum dilakukan secara rutin oleh pegawai dari Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang yang ditunjuk sesuai tupoksi dari pihak Bidang Pemanfaatan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang yakni pegawai bagian ekstensifikasi. Selain itu, belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai bagian ekstensifikasi Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Juga terlihat dari jadwal sosialisasi yang tidak pasti setiap bulannya. Maka dapat disimpulkan hal ini belum sesuai dengan apa yang dikatakan Edward bahwa komunikasi suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Sumberdaya

Sarana dan prasarana untuk seksi bidang pemanfaatan masih kurang maksimal. Dalam hal ini kebutuhan petugas lapangan merasa kesulitan dalam transportasi lapangan.

Disposisi

Setiap ada kebijakan yang dibuat oleh tingkat atas akan selalu dilakukan penerusan informasi ke bagian bawah bagaimana sebuah kebijakan tersebut harus dilaksanakan dari mulai perencanaan, implementasi, hingga evaluasi setiap kebijakan yang ada.

Struktur Birokrasi

Setiap seksi bidang memiliki peraturan dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi, serta pertanggungjawabannya dalam berupa SOP, setelah penulis cek memang SOP setiap seksi bidang berbeda - beda sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya optimal peneliti menemukan dilapangan masih ada kendala - kendala yang masih belum bisa diatasi oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang misalnya kekurangan personil atau aparat, masih adanya para pegawai yang belum bisa menggunakan teknologi informasi, banyak pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan.

5.2. Saran

5.2.1.Saran Teoritis

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian

lanjutan dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan model – model implementasi kebijakan publik pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

5.2.2.Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan analisa yang telah dilakukan dapat direkomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan upaya yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Saran penulis terhadap Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang harus tetap dijaga dan konsisten. Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang disarankan bisa lebih optimal dalam mengatasi hambatan – hambatan dilapangan. Akan lebih baik segala kendala dan tantangan, hambatan dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- D.A. Tiasnadimidjaja. 1997. *Dalam Asep Warlan Yusuf Pranata Pembangunan*. Bandung : Universitas Parahyangan.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif*,

- Kuantitatif, dan Mixed.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Penterjemah Achmad Fawaid.
- Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Faisal, Sanafiah. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang : YA3
- G, l.r.r.g.e.mills. 2006. *Competencies for analys and application*. USA. Pearson
- Handyanigrat, Soewono. 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan SP, Malayu. 2001. *Manajemen (dasar, pengertian dan masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Taat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hermit, Herman. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Semarang : Mandar Maju.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction To The Study Of Public Policy*. Monterey California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Moleong, Lexi j. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya offset.
- Natawijaya. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1995. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Press.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Radja Grafindo Persada
- Rutan, Uton. 1991. *Model Alokasi Optimal Lahan Umum Kota*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. No 2 Triwulan II.
- Santosa, Pandji. 2008. *Mengukur Efektifitas Penggunaan Lahan Di Kawasan Cekungan Bandung*. Bandung: LoGoz Publishing
- Soedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjani, Linggar. 1987. *Lingkungan Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung, ALFABETA
- Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management*. Addis Abeba.
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Muter, Donald S and Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Frame*. Sage Publication Inc
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Erlangga.
- Winardi. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grafiti.

Dokumen dan Sumber lain :

- Republik Indonesia. 2007. Undang Undang *Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Provinsi Banten. 2015. Peraturan Bupati Tangerang *Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Provinsi Banten. 2014. Peraturan Bupati Tangerang *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Provinsi Banten. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2018*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Kabupaten Tangerang. 2014. *SOP Bidang Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tangerang*. Tangerang : Sekretariat Daerah
- Kabupaten Tangerang. 2012. *Renstra Dinas Tata Ruang 2013-2018*. Tangerang: Sekretariat Daerah.
- Badan Statistik Kabupaten Tangerang. 2015. *Kecamatan Tigaraksa Dalam Angka*. [www.kecamatan-tigaraksa-dalam-angka-2016-jpdk\(secured\).com](http://www.kecamatan-tigaraksa-dalam-angka-2016-jpdk(secured).com) (September 2016)
- Bappeda Kabupaten Tangerang. (www.tempointeraktif.com) (Juni 2016)